

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 16

TAHUN 2006

OPERASIONAL FREEPORT.

Wapres Minta Semua Pihak Taati Peraturan

JAKARTA (Suara Karya): Wapres Jusuf Kalla meminta seluruh pihak di sekitar area kerja PT Freeport Indonesia menaati peraturan, termasuk soal perizinan bagi rakyat setempat membuka tambang di area yang telah ditentukan.

Kepada pers di Jakarta, kemarin, Kalla menyatakan bahwa pemda setempat dan pihak-pihak terkait seharusnya memberikan pengertian dan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai keberadaan Freeport. "Masyarakat secara keseluruhan harus memahami bahwa Freeport adalah usaha resmi yang memberikan manfaat kepada negara, masyarakat, pemda, dan juga pengusahanya," ujar Kalla.

Dia menambahkan, pemda setempat seharusnya mengatur agar rakyat tetap dapat mencari nafkah di sekitar area kerja Freeport tanpa mengganggu keamanan dan kegiatan perusahaan tersebut secara keseluruhan.

Kalla menekankan bahwa Freeport berperan signifikan dalam mengalirkan manfaat sosial-ekonomi masyarakat sekitar area kerja mereka, dan masyarakat Papua secara keseluruhan. Bahkan pendapatan rakyat di sekitar area kerja Freeport -- terlebih lagi mereka yang bekerja di perusahaan tersebut -- lebih besar daripada pendapatan masyarakat di tempat lain.

"Kalau Anda ke Freeport dan daerah-daerah sekitarnya, itu (kondisinya) jauh lebih baik dibanding dengan misalnya Yahokimo. Artinya, (Freeport) pasti memberi manfaat. Rumah-rumah masyarakat lebih baik. Gaji orang bekerja di situ saya kira lebih tinggi daripada gaji Anda di sini. Itu pasti," katanya.

Menurut Kalla, penghasilan yang diperoleh pemerintah dari Freeport tidak hanya memberi manfaat bagi daerah Timika yang menjadi lokasi tambang perusahaan tersebut, tetapi juga terhadap seluruh Papua.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menegaskan, pemerintah menjamin keamanan dan keselamatan Freeport. Karena itu, tidak ada alasan Freeport berhenti operasi. "Kita terus mendorong agar Freeport bisa segera beroperasi kembali," katanya. (Rully/Indra)



Jusuf Kalla

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : /		TAHUN 2006

Freeport Diminta Segera Beroperasi

JAKARTA — Pemerintah menyatakan memberikan jaminan keamanan dan meminta Freeport Indonesia segera beroperasi kembali. Pasalnya, penghentian operasi yang dilakukan saat ini, berdampak negatif terhadap penerimaan negara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yugiandoro, mengatakan hingga kini pemerintah masih terus memantau keadaan Freeport. Purnomo mengakui, agar tertata baik, pengamanan tidak bisa hanya dilakukan Polri. Karena itu, ia menyatakan telah melakukan koordinasi dengan Menko Polhukam berkaitan dengan hal itu.

"Secara resmi, ada permintaan dari Menko Polhukam untuk pengamanan, karena Freeport termasuk objek nasional. Nantinya akan

dilakukan sepenuhnya oleh Polri. Sekarang oleh TNI dulu," jelas Purnomo, di Jakarta, Jumat (24/2).

Ia juga menyatakan memahami, mengapa Freeport tidak bisa serta-merta beroperasi dan berproduksi. "Mereka akan mulai bila telah yakin akan keamanan," kata Purnomo.

Ditemui terpisah, Wapres Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah akan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat di Papua, khususnya di sekitar lokasi pertambangan.

Kalla mengatakan, pemerintah juga harus menaati semua aturan. Termasuk memungkinkan penambang-penambang rakyat tetap bekerja, sesuai ketentuan dan tempat yang diizinkan.

"Kalau memang tidak diizinkan, ya tidak boleh," kata Kalla, usai

shalat Jumat di Kantor Wapres, kemarin. Menurutnya, yang terbaik adalah mencari solusi yang bisa diterima kedua pihak, yang memungkinkan rakyat bisa bekerja, sementara aktivitas Freeport juga tidak terganggu.

Di Timika, Papua, hingga kemarin aktivitas Freeport masih terhenti akibat blokade yang dilakukan masyarakat. Sementara itu, sejumlah pejabat pemerintah, antara lain, Kapolda Papua dan Pangdam Trikora, serta pimpinan Freeport Indonesia, terus bernegosiasi dengan masyarakat guna mencari solusi terbaik.

"Kami masih bernegosiasi untuk mencari solusi terbaik, yang tak merugikan semua pihak," kata Senior Manager Corporate Communications Freeport Indonesia, Sidharta Moersjid. ■ uba/c40

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (24) 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 4		
TAHUN 2006		

Negosiasi dengan Freeport Belum Berhasil Pemblokade Jalan

JAYAPURA - Negosiasi dengan para pendulang agar membuka kembali blokade jalan masuk ke PT Freeport Indonesia di Mile 72 Ridge Camp, Tembagapura, Timika masih terus dilakukan hingga hari ini, namun belum membuahkan hasil, ungkap Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Polisi Tomy Yakobos kepada *Pembaruan* di Jayapura, Papua, Jumat (24/2).

"Kemarin kami telah berbicara dengan mereka, namun tidak berhasil. Dan hari ini kami akan mencoba terus," tuturnya. Dia menambahkan, pembicaraan terus dilakukan dengan para tokoh masyarakat dan sejumlah kepala suku di sana.

Dia mengakui, tidak ada batas waktu blokade itu harus dibuka, namun polisi tetap berkomunikasi dengan para warga untuk mendapatkan solusi terbaik bagi semua pihak. "Kami terus melakukan pendekatan dan sabar mendengarkan aspirasi mereka. Kita tak bisa paksakan palang dibuka, kami tetap mengedepankan negosiasi," katanya.

Sementara itu anggota DPR Sabam Sirait dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, jajaran DPR meminta kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Freeport menyelesaikan konflik tanpa kekerasan bersenjata akibat pendulangan sisa-sisa emas dari pembuangan *tailing* Freeport. Dia mengingatkan, pemerintah dan aparat keamanan harus melindungi rakyat di sana. Sebab, mereka hanya

mengambil bagian *tampias* (imbas) yang tersisa dari kekayaan alamnya. Pemerintah dan Freeport harus menghentikan pendekatan kekerasan terhadap rakyat asli Papua.

Menurut Sabam, pendulangan itu seharusnya diizinkan hanya untuk rakyat asli Papua. Apalagi, sambungnya, penambangan di sana telah menguntungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha nasional, dan Amerika Serikat. Selama 30 tahun penambangan itu kurang memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat di Papua.

"Saya minta pemerintah pusat mengumumkan secara terbuka kepada rakyat Indonesia, khususnya Papua, berapa royalti yang diterima sejak tambang itu beroperasi. Royalti itu berasal dari jenis tambang apa saja, emas, tembaga dan bahan ikutan lain. Selama ini, hal itu tidak pernah diumumkan secara terbuka.

Jangan pemerintah dan pengusaha besar baik nasional maupun internasional yang kaya, tetapi rakyat dimiskinkan," tandasnya.

Anggota Komisi I DPR itu meminta pula Kapolri membebaskan para mahasiswa yang diduga merusak kantor Freeport di Plaza 69 Kuningan, Jakarta. Sebab, tindakan itu lahir akibat tidak adanya dialog kemanusiaan antara petugas keamanan dengan para mahasiswa.

"Sesungguhnya semua persoalan bisa diatasi dengan dialog yang baik antara petugas keamanan dan masyarakat Papua. Jangan kita memperlakukan mereka dengan kekerasan. Sebaliknya, mahasiswa dan masyarakat Papua menyampaikan aspirasi kepada Freeport dengan cara elegan sehingga tidak mengorbankan diri sendiri," katanya.

Diketahui Rakyat

Secara terpisah pengamat masalah sosial Agus Sumule dari Universitas Papua, Manokwari meminta pemerintah pusat mengumumkan secara terbuka isi kontrak karya dengan PT Freeport untuk diketahui rakyat. Sebab, selama ini rakyat Indonesia tidak mengetahui hal itu, termasuk apa saja yang menjadi kewajiban perusahaan kepada pemerintah, rakyat Papua, kewajiban dan hak-hak kedua belah pihak, jenis tambang apa yang dikelola dan sebagainya.

Dia mendesak pula pemerintah mengumumkan berapa royalti yang diterima selama ini. Rakyat Indonesia, tuturnya, cuma mengetahui ada tambang emas dan tembaga di Tembagapura, tetapi tidak

pernah mengetahui berapa royalti dan pajak yang diterima pemerintah. "Ini semua harus transparan agar rakyat mengetahuinya," tandasnya.

Secara terpisah Kepala Bidang Operasional, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Indria Fernida mendesak pemerintah dan Polri bersikap profesional menanggapi berkembangnya situasi pasca penembakan terhadap tiga masyarakat Papua di Mimika.

"Kamis (23/2) dini hari Kontras menerima kedatangan 13 orang mahasiswa Papua yang melakukan perusakan Kantor PT Freeport Indonesia di Jakarta, 23 Februari 2006. Mereka meminta perlindungan hukum. Kami minta Polri harus bertindak persuasif," katanya.

(GAB/ROB/W-8/A-21/E-8)

38

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 1		TAHUN 2006

Kasus Tembagaपुरa Masyarakat Buka Blokade di Mile 74

Tembagapura - Pemblokadean jalan tambang di Mile 74 Tembagaपुरa berakhir Sabtu (25/2) pagi. Upacara pembukaan palang yang memblokade jalan berlangsung dengan upacara adat masyarakat setempat, yaitu dengan memotong beberapa ekor babi.

Hal itu merupakan hasil negosiasi yang dilakukan secara maraton oleh tim karyawan Freeport yang berasal dari tujuh suku setempat dengan masyarakat yang memblokade jalan di mile 74, jalan yang mengarah ke tambang PT Freeport-Indonesia.

Pada hari ini (25/2) blokade akan dibuka pada pukul 14.00 waktu setempat. Perundingan untuk mengakhiri blokade itu berlangsung sejak Jumat (24/2), siang sampai Sabtu dini hari pukul 04.00 waktu setempat, bertempat di Senior Guest House, Kota Tembagaपुरa yang terletak di Mile 68.

Dalam pertemuan tersebut, yang juga dihadiri Bupati Timika Klemens Tinal, Komisaris PT Freeport Tom Baenal, dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Yoppie Kilangin, dirumuskan aspirasi yang akan disampaikan kepada manajemen PT Freeport. Termasuk dalam keputusan itu adalah kesepakatan untuk membuka palang jalan.

Namun, belum jelas nasib kegiatan pendulangan emas di tailing tambang, yang selama ini dilarang oleh pihak perusahaan. Blokade jalan itu akan dibuka sendiri oleh para pelaku, yang disertai upacara adat bakar batu dan potong babi berjumlah enam ekor.

Kapolda Papua Irjen Tommy Jacobus, yang didampingi Pangdam Trikora Mayjen George Toisutta, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Adrie Maghribi dan stafnya

menjelaskan hasil pertemuan para tokoh masyarakat dan perwakilan dari pihak pemblokade jalan sangat menggembirakan dan merupakan penyelesaian yang sangat baik.

Dan itu merupakan hasil yang dicapai mereka tanpa campur tangan TNI/Polri maupun manajemen. "Itu merupakan hasil murni kesepakatan mereka sendiri," jelas Tommy.

Diharapkan, pembukaan blokade pada sore nanti berjalan baik. Di lokasi mile 74 terlihat warga masyarakat sudah menggali lubang sejak pagi untuk menggelar pesta adat bakar batu. Lubang tersebut tempat memasak makanan, termasuk daging babi dengan batu panas sebagaimana lazimnya memasak suku Dani.

Pemblokadean jalan, yang menyebabkan kegiatan tambang terhenti selama empat hari merupakan buntut bentrokan antara aparat keamanan perusahaan, yang melarang masyarakat mendulang emas di tailing tam-

bang yang menumpuk di tepian sungai, dan para pendulang. Kegiatan itu dilarang karena dinilai membahayakan nyawa mereka.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah melindungi seluruh masyarakat Papua di sekitar lokasi pertambangan PT Freeport dan perusahaan tambang tersebut. Ia juga telah menginstruksikan Pangdam Trikora dan Kapolda Papua mengamankan daerah tersebut menyusul blokade perusahaan tambang itu oleh warga sekitar lokasi.

"Sekarang pemerintah harus memberi perlindungan kepada masyarakat dan juga investasi yang ada di sana," kata Wapres Kalla di Kantornya di Jakarta, Jumat (24/2).

Wapres meminta masyarakat Papua memahami manfaat Freeport kepada negara, masyarakat dan pemerintah daerah. Kalla memuji adanya peningkatan pendapatan masyarakat sekitar lantaran beroperasinya perusahaan tambang itu.

(soehendarto/
rikando somba)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPASS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										
HALAMAN: 2											TAHUN 2006

Troop reinforcements sent in as standoff continues at Freeport

Tb. Arie Rukmantara
The Jakarta Post/Jakarta

The government was sending hundreds of troops Friday to safeguard PT Freeport Indonesia as a roadblock continued at the mine site in Papua province, halting its production for a third consecutive day.

"Today, the government has mobilized 300 police personnel and one battalion of (about 700) Army soldiers to secure Freeport," National Police spokesman Brig. Gen. Anton Bachrul Alam said in Jakarta.

The deployment of troops was ordered by Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Widodo Adisucipto, Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro said separately.

"Police can't handle the security alone. The chief security minister has asked the military to handle it and it will be returned to police after things are back to normal," he was quoted by Reuters as saying.

Earlier, President Susilo

Bambang Yudhoyono asked Purnomo to coordinate with the chief security minister to end the standoff, fearing a sizeable loss of national income if the mine stayed shut.

The government, which owns 9 percent of the company's shares, calculates the halt in operations is costing it US\$3 million in tax and non-tax revenue every day.

Hundreds of Papuans maintained barricades at the main entrance of the Grasberg mine, forcing the local arm of U.S.-based Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. to stay closed.

They are demanding that Freeport allow local people to sift through the firm's waste ore.

"If they are prevented from doing so, they demand compensation from the company," Freeport's independent commissioner Tom Beanal, who is also a local Amungme tribal leader, told *The Jakarta Post*.

Tom once sued Freeport in a United States court for allegedly polluting the environment.

"Actually, shifting through tailings, which consists of toxic (materials), is dangerous to human health. But we are still looking for a way out to settle the problem," he said.

Negotiations with the company's management, local government, security officials and tribal leaders were deadlocked.

The director of local human rights group Elsham Papua, Aloysius Renwarin, said the demand for compensation was merely an expression of anger from locals who long felt they were ignored by both Freeport and the government.

"If they demand compensation, that's normal because it's their land, which they inherited from their ancestors," he told the *Post*.

"Freeport is just a company that acquired a contract to make use of the land, not to own it."

He said the problem was not simply about locals looking for a handout.

Aloysius said that Jakarta should realize the current tension in the area resulted

from the buildup of many problems, due to political, social, economic and environmental causes.

"Protesters have demanded a dialog with Freeport's director James Moffett and President Susilo Bambang Yudhoyono to discuss how to improve the welfare of Papuans," he said.


Aloysius warned that ignoring the demand for dialog could further fan separatist sentiment among Papuans.

"Freeport's operations have brought a huge fortune to Jakarta. Papua has been its 'kitchen' of development. The government must pay more attention to Papuans...otherwise they will be very disappointed to be part of this republic," he said.

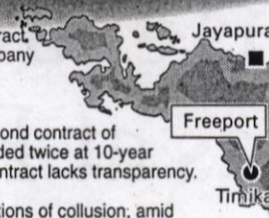
He also said some protesters demanded the company's operations be stopped permanently because they said it failed to better the welfare of local people. (09)

40

Uneasy relations



April 1967 - Freeport Indonesia (FI) signs a contract with the govt for a 30-year contract of work, making it the sole company to explore the West Papuan mountainous area of Ertsberg.



Dec. 1991 - FI signs a second contract of work, which can be extended twice at 10-year periods. Critics say the contract lacks transparency.

Nov. 1998 - FI denies allegations of collusion, amid protests about alleged pollution from its tailings.

Jan. 27, 1999 - President B.J. Habibie supports FI's controversial expansion plan of its Grasberg mine, although Mines and Energy Minister Kuntoro Mangkusubroto had asked for further assessment.

Feb. 21, 1999 - Papuan tribal groups living near FI's Grasberg mine oppose the company's plan to increase production, urging the govt to reject the plan because it would cause ecological damage.

Aug. 31, 2001 - Two Americans and an Indonesian are killed and 11 others wounded in an ambush of a group of FI employees on the road to the mine.

Feb. 10, 2006 - Govt forms a joint team to look into FI activities, particularly on environmental protection, while VP Jusuf Kalla says distribution of profits by the company should be fairer to finance development amid the soaring prices of copper and gold.

Feb. 21-24 - FI ceases mining activities amid a standoff with local residents after clashes with the firm's security officers.

Sources: The Jakarta Post, Republika

JP/Budi Sudarmo, Darul Aqsha

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2006

PERTAMBANGAN

Pemerintah Minta Freeport Beroperasi Lagi

JAKARTA (Media): Pemerintah meminta manajemen PT Freeport Indonesia segera mengoperasikan kembali perusahaan mereka. Pemerintah akan menjamin keamanan dan keselamatan mereka.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) untuk mengamankan perusahaan tambang di Papua yang masuk objek vital nasional tersebut.

"Menteri Polhukam telah memerintahkan TNI dan Polri untuk mengamankan PT Freeport," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, kemarin.

Purnomo mengatakan berhenti-

nya operasi Freeport juga merugikan negara karena penerimaan negara dari royalti menurun. "Karena itu, kita akan terus mendorong agar perusahaan tambang emas dan tembaga itu bisa segera beroperasi kembali."

Selain mendorong Freeport beroperasi kembali, pemerintah juga minta perusahaan tambang raksasa itu meningkatkan dana untuk pengembangan masyarakat.

Penutupan kegiatan operasi PT Freeport akan mengurangi peneri-

maan negara US\$2,7 juta per hari.

Perkiraan itu didasarkan pada rata-rata penerimaan negara dari perusahaan tambang raksasa dari AS yang mencapai US\$1 miliar per tahun.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta pemerintah memberikan pemahaman dan mengatur masyarakat di sekitar pertambangan PT Freeport untuk tetap bekerja, tapi tidak mengganggu keamanan.

"Sekarang urusannya adalah memberikan pemahaman kepada rakyat dan mengatur bagaimana

rakyat tidak takut bekerja, tetapi juga tidak mengganggu keamanan, tidak mengganggu Freeport secara keseluruhan," ujar Wapres, kemarin.

Masyarakat, kata Wapres harus memahami bahwa Freeport adalah usaha resmi yang memberikan manfaat, baik kepada masyarakat, negara, pemda, dan juga pengusahanya.

Di Tembagapura, warga yang memblokade jalan hingga tadi malam mengadakan pertemuan dengan aparat keamanan, pejabat setempat, dan pimpinan PT Freeport.

Unsur pimpinan PT Freeport James Moffett, menurut fasilitator Yoppy, menghargai tuntutan warga setempat dan menunggu hasil kesepakatan dari pertemuan tersebut.

(Sdk/Rdn/Fud/Sur/San/X-8)



■ MEDIAAM SOLEH
Jusuf Kalla

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (25) 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 5

TAHUN 2006

Sand mines sealed by police after complaints in Batam

Fadli
The Jakarta Post/Batam

Police have sealed illegal sand mines and confiscated equipment in Nongsa district in Batam, Riau islands, following strong complaints from local residents, an officer said.

Head of the Batam Police detectives unit Comr. Putut Wicaksono told *The Jakarta Post* that besides sealing the mines, the police had also confiscated heavy machinery, including excavators and trucks.

He said the action was taken in response to complaints from the management of the Nongsa development estate and nearby residents.

Putut said that based on a 1997 law on management of the environment, any mining activities that had a negative impact on the surrounding environment were prohibited.

"We will coordinate with the local environmental impact management agency and the Office of the Minister for the Environment to ask their recommendations," he said, adding that no one had been arrested yet.

The sand mining in Nongsa not only left gaping holes that became dark pools of water some five meters deep, creating a breeding ground for malaria-carrying mosquitoes, but also increased the risk of flooding in the area.

The residents around the sand mines had complained to the sub-district office and police, but there had been no response.

Residents said the pools threatened the safety of their children. Three children aged between three and seven reportedly drowned while playing in the pools in 2004.

An increase in the number of malaria cases in the area also has been blamed on the pools, with

the Nongsa community health center recording about 90 malaria cases a month.

There are no records kept on the amount of sand being removed, nor does the Batam city administration have a clear policy on whether the work is legal or not.

Abu Bakar, 40, one of the workers at the mining site, said that the sand mining activities in the area had been conducted for genera-

tions. In 1996 a certain party offered help in the form of modern heavy machinery, he said.

"Now you see the machinery has been confiscated.... this is our source of livelihood," said Abu Bakar, who earned Rp 600,000 (US\$64.86) a month at the mine.

The sand mines are located in Teluk Mata Ikan, Sungai Tongkang, Batu Besar and Kabil kampongs, where mining activities are conducted by various parties.

Abu Bakar said that sand from the area was sold to shops selling building materials in Batam. Some residents even bought the sand directly at the mining sites.

Meanwhile, president of Nongsa development estate Djoko Pramono said that the sand mining had discouraged buyers from living at the nearby marine resort area.

"I sent the letters to various parties, including the police to ask for the closure of the mines. Who thinks foreign tourists will be willing to come here? Road access is damaged," he said.

Djoko said that the mining activities had led to a sharp drop in the occupancy rate in six nearby resorts with a combined area of 2,000 hectares.

"How can Batam compete with Bali and other tourist areas like Bandung, if the surrounding environment is in such a poor state?" he added.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 23

TAHUN 2006

Galian Pasir yang Meresahkan

SATU lagi potensi bencana menanti Jawa Barat (Jabar). Setelah penggundulan hutan yang mengakibatkan longsor di banyak wilayah, kini perusakan lingkungan dalam bentuk lain menjadi ancaman serius di tatar Priangan.

Penambangan galian C atau galian pasir, sudah dua tahun terakhir menjadi masalah. Dan, pekan ini, warga dibuat terperangah ketika para pakar lingkungan menunjukkan fakta-fakta kerusakan alam yang timbul akibat galian pasir.

"Rakyat di sekitar wilayah galian pasir sudah mulai merasakan dampak kerusakan alam. Selain kehilangan banyak mata air dan kerusakan iklim, mereka juga sudah kehilangan mata pencaharian," tutur pakar lingkungan S Sobirin di Bandung, Selasa (21/2).

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Jabar Ismail Hasjim mengatakan setidaknya ada sembilan titik kegiatan penambangan pasir di wilayah ini yang sudah merusak lingkungan. Tragisnya, kesembilan titik itu menyebar setidaknya di delapan kabupaten.

Dari identifikasi sementara, lokasi penambangan yang merusak berada di Kabupaten Sumedang, Cirebon, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Bandung, dan Purwakarta. Beberapa lokasi penambangan itu, yakni Conggeang, Paseh, dan Cimalaka di Sumedang, Cikalahang dan Astana Japura di Cirebon, Cipamingkis di Bogor, Warung Kondang di Cianjur, serta Cimangkok di Sukabumi.

Dari setiap titik, penambangan pasir dilakukan di areal yang luasnya mencapai 40 hektare (ha) hingga 80 ha. Sobirin menambahkan, data di



LINGKUNGAN RUSAK: Penggalan pasir berlangsung di sekitar Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, beberapa waktu lalu. Perusakan lingkungan akibat penambangan pasir tidak hanya dilakukan para penambang liar, tetapi juga penambang legal.

lapangan memperlihatkan, di sekitar Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, pengerukan pasir sudah menjarah setidaknya 300 ha lahan. Di Cirebon, di kaki Gunung Ciremai, lahan subur puluhan hektare pun sudah digerus para pengusaha penambangan pasir.

Kondisi itu tentu saja meresahkan warga. Kedua gunung itu berfungsi sebagai generator alam bagi kawasan sekitarnya. Gunung Tampomas untuk kawasan Sumedang dan pantai utara, sedangkan Ciremai menjadi pendukung keseimbangan alam utama untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

"Generator alam berfungsi bagi keberlangsungan dan kelestarian alam. Generator berarti pembentuk iklim mikro, penyedia sumber air, dan kesuburan tanah," tandasnya.

Menurut Ismail Hasjim, perusakan lingkungan akibat penambangan pasir ini tidak hanya dilakukan oleh para penambang liar, tapi juga

'Dalam hitungan ekonomi, diperkirakan kerugian per tahun akibat galian pasir mencapai Rp4 triliun hingga Rp5 triliun.'

penambang legal yang mengantongi izin.

Perda tidak dilirik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sebenarnya sudah melarang penambang untuk menyentuh kawasan gunung sebagai hutan

lindung lewat Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2003 tentang Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jabar.

Kedua gunung, lengkap dengan wilayah di kaki gunung sebagai penyangganya merupakan kawasan hijau yang harus dilestarikan. Namun, RTRW ini menjadi macan omping di atas kertas. Di era otonomi daerah, pemerintah kabupaten (pemkab) sepertinya tidak melirik perda itu.

Di Kabupaten Sumedang, misalnya, bupatinya mengeluarkan dua perda tentang galian pasir ini, yakni Perda No 23 Tahun 2003 tentang Usaha Penambangan Galian C dan SK Bupati 541.3/Kep.26-PE/2003 tentang Wilayah Pertambangan Galian C.

Kedua aturan inilah yang kemudian membuat para pengusaha penambangan pasir melenggang di Kabupaten

Sumedang. Kaki Gunung Tampomas pun digerus dari empat arah, mulai Kojengkang, Cibeureum, Paseh, dan Conggeang di Kecamatan Cimalaka.

Mengizinkan pengusaha galian pasir beroperasi juga berarti mengalirnya pendapatan asli daerah (PAD) bagi kantong APBD. Dengan mengizinkan penggerusan di kaki Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang diperkirakan menerima retribusi Rp400 juta setiap tahun. Jumlah ini tidak terlalu besar untuk mengisi kantong PAD sebesar Rp40 miliar dan APBD sekitar Rp400 miliar per tahun.

Pakar lingkungan dari ITB Mubyar Purwasasmita menyebutkan retribusi dari galian pasir ini sangat tidak bernilai jika dibandingkan dengan kerugian yang terjadi. Dalam hitungan ekonomi, diperkirakan kerugian per tahun akibat galian pasir mencapai Rp4 triliun hingga Rp5 triliun. "Sumber mata air yang hilang adalah kerugian besar secara ekonomi."

Kerugian kini mulai dirasakan. Banjir di kawasan pantai utara seperti di Cirebon dan Indramayu, yang datang setiap tahun, disebabkan kerusakan Gunung Tampomas dan Gunung Ciremai.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), mengajukan lima konsep sebagai upaya mencegah kerusakan alam. Selain audit lingkungan, perlu ada sanksi hukum bagi pengusaha penambang galian C. Yang lainnya, DPKLTS meminta penggalian pasir dengan peralatan berat dihentikan.

● Sugeng Sumaryadi/Eriez
M Rizal/*/*B-1

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM
JAN (FEB) MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (25) 26 27 28 29 30 31 HALAMAN: 4.		
TAHUN 2006		

Freeport vs Penambang Liar

Hari Susanto

Ahli Peneliti Utama P2E-LIPI



Kajian dampak lingkungan (AMDAL) yang dilakukan konsultan internasional Dames & Moore di paruh kedua 1990-an, terhadap kenaikan produksi PT Freeport Indonesia (PTFI) dari 125-K (125 ribu ton per hari) menjadi 300-K (300 ribu ton per hari), telah menunjukkan semakin tajamnya kesenjangan distribusi pendapatan di wilayah Timika, Irian Jaya.

Indikator ketimpangan tersebut diperlihatkan dengan angka koefisien ketimpangan pendapatan (*Gini Ratio*) di atas 0,5. Koefisien itu menunjukkan sangat timpangnya distribusi pendapatan antara kelompok pendapatan di wilayah itu, khususnya antara PT Freeport dengan para penduduk asli yang juga menjadi penambang liar.

Para penambang yang dikelompokkan ke dalam penambang liar atau penambang tanpa izin (PETI) adalah penambang yang beroperasi di kawasan tailing km-71 hingga km-76 untuk mengais-ngais rejeki emas dari limbah PTFI yang menutupi sungai Kamoro, Aikwa maupun lainnya. Dari hasil mengais-ngais itu, penambang liar bisa memperoleh pendapatan sekitar Rp 80.000 hingga Rp 120.000.

Sedangkan PTFI adalah perusahaan pertambangan Amerika Serikat yang diresmikan oleh mantan Presiden Suharto dan telah beroperasi selama 33 tahun di bumi Papua.

Penyalahgunaan Izin

Pada tahun 2004, Freeport dengan bangganya menyatakan diri sebagai pembayar pajak terbesar di Indonesia dan telah menyerahkan dividen, pajak dan royalti ke negara sebesar US\$ 250 juta. Jumlah tersebut di tahun 2005 meningkat hampir empat kali lipat menjadi US\$ 1,1 miliar.

Namun pemerintah mulai mencium bau busuk di perusahaan ini. Dahulunya izin yang diajukan adalah penambangan tembaga, tapi belakangan yang ditambang bukan hanya tembaga, namun juga perak dan emas. Aktivitas penambangan emas ini sangat menjanjikan uang yang melimpah karena harga per trol-ons-nya mencapai US\$ 600.

Satu trol-ons itu sama dengan 31,03 gram. Jadi setiap gramnya hampir mencapai seharga US\$ 20. Kalau kurs satu dollar Amerika Serikat itu seharga Rp 9.500, maka harga setiap gram emas mencapai angka Rp 190.000.

Bisa dibayangkan kalau setiap ton eksploitasi pasir/batuan di ladang Grassberg dan Ertzberg yang notabene ladang konsensi PTFI itu terkandung 5 persen emas, maka setiap ton batuan yang dieksploitasi tadi menghasilkan sekitar 50 kilogram kandungan emas.

Bila hasil AMDAL yang dilakukan pada tahun 1996 dan 1997 tadi menyebutkan PTFI akan mengeksploitasi ladang Grasberg dan Ertzberg sebesar 300.000 ton (300-K) setiap harinya, tentunya jumlah kandungan emas yang dikeduk Freeport setiap hari mencapai 15.000 ton.

Katakanlah dalam pemrosesan tersebut ada sepertiga kandungan emas yang hilang, sehingga kandungan yang bisa menjadi batangan emas itu hanya 10.000 ton. Dengan asumsi setiap gramnya bernilai US\$ 20, maka dari 10.000 ton emas tersebut Freeport akan mendapatkan penghasilan sebesar US\$ 20 miliar perhari.

Bila dalam setahun Freeport beroperasi 300 hari, maka dari kegiatan sampingan ini dalam setahunnya Freeport menanggok US\$ 6 triliun— karena kegiatan utama dari PTFI adalah penambangan tembaga.

Tentu, cukup kuat alasan Wakil Presiden Yusuf Kalla untuk melakukan audit terhadap perusahaan penambangan internasional tersebut. Bahkan Yusuf Kalla menginginkan adanya perbaikan kontrak bagi hasil kembali, agar masyarakat daerah, khususnya Papua, akan memperoleh bagi hasil yang lebih baik dan lebih transparan.

45

Perusakan Lingkungan

Berdasarkan pemantauan pelbagai kalangan, selain menyatakan diri sebagai pembayar pajak terbesar, Freeport juga menjadi penyumbang kerusakan lingkungan di wilayah konsensi kerjanya.

Meleburnya salju di puncak gunung Sukarnopura itu, tidak terlepas dari aktivitas peleburan tembaga di kawasan konsensi kegiatan penambangan Freeport. Seperti diketahui bahwa peleburan batuan yang mengandung tembaga, perak dan emas itu menghasilkan debu yang tertiuap angin menuju pucak salju Gunung Sukarnopura. Implikasinya, debu tersebut menempel di salju abadi dan menghancurkan saljunya. Ini merupakan bukti pertama perusakan lingkungan yang dilakukan oleh Freeport.

"Harus ada audit ulang terhadap kegiatan produksi Freeport maupun perhatian perusahaan tersebut terhadap lingkungannya."

Fakta lainnya, buangan ampas peleburan tembaga itu disalurkan ke empat sungai yang disebut dengan DAS-KAMM. Apa implikasinya dari pembuangan tailing itu? Jelas tailing tersebut menutupi sungai dan mempersempit badan sungai. Akibatnya, karena curah hujan yang dahulunya mampu ditampung oleh DAS-KAMM kini merebak ke luar DAS-KAMM dan menyebabkan banjir. Namun yang lebih menyedihkan adalah buangan tailing itu mengandung mercury. Tentu hal ini akan menyebabkan perubahan terhadap kehidupan flora dan fauna.

Di lain sisi, Freeport masih ingin memperluas areal produksi penambangan. Peraturan Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 (Perpu 1/2004) telah mengizinkan kepada 13 perusahaan untuk melakukan eksploitasi penambangan di kawasan hutan lindung. Salah satu perusahaan yang mendapatkan lisensi dari Perpu ter-

sebut adalah PTFI.

Namun setelah diamati oleh para pencinta lingkungan, ladang perluasan konsensi PTFI berdasarkan Perpu 1/2004 tersebut memasuki wilayah taman nasional Laurentz yang mencakup 6 kabupaten di provinsi Papua. Tentu hal ini menyalahi ketentuan yang tertera di dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UU 24/1992).

Padahal taman nasional Laurentz (TNL) ini mempunyai varitas mamalia terkemuka di kawasan Melanesia. Dari 154 spesies yang hidup di Papua, sekitar 123 spesies mamalia hidup di TNL. Selain itu, terdapat 411 spesies hidup di kawasan TNL ini dari total 639 spesies burung yang ada di Papua.

PTFI Vs PETI

Catatan lainnya adalah adanya kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) di sekitar DAS-KAMM yang memanfaatkan limbah tailing PTFI tersebut. Aktivitas PETI ini marak dalam kurun beberapa tahun terakhir di wilayah konsensi PTFI. Mereka melakukan penambangan emas karena seperti diketahui harga emas di tingkat internasional semakin naik hari demi hari.

Namun, pengelola PTFI sangat keras melakukan penertiban kegiatan PETI, sehingga terjadi bentrokan dan pada akhirnya membuahakan perkelahian di pihak PETI maupun PTFI. Tentu, persoalan tersebut menjadi besar karena adanya persoalan-persoalan kepentingan ekonomi maupun sosial budaya setempat. Penambang kelompok PETI dan masyarakat setempat memblokir jalur kegiatan produksi PTFI, dan implikasinya Freeport terpaksa menghentikan kegiatan produksi.

Persoalan antara PTFI dengan penduduk setempat, khususnya suku Amungme yang sudah ratusan tahun mendiami wilayah yang di-klaim sebagai wilayah konsensi PTFI belakangan ini. Namun suku Amungme dan Kamoro masih tetap bertahan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah adat ulayat sebagai peninggalan nenek-monyangnya.

Tentu, tuntutan suku Amungme dan Kamoro sangat beralasan dan mendasar, akan tetapi semenjak awal 1970-an PTFI beroperasi, suku Amungme dan Kamoro masih hidup seperti jaman nenek moyang mereka. Di lain sisi, PTFI

telah mengeduk kekayaan alam wilayah suku Amungme itu triliunan dollar Amerika Serikat.

Atas dasar itu, PTFI hendaknya bertindak arif-bijaksanaan dan mendorong pengembangan pribadi masyarakat Amungme dan Kamoro serta lainnya di wilayah konsensi mereka. Kehadiran PTFI telah menjadikan gula bagi kawasan Papua, sehingga berbagai semut berdatangan menghampiri gula yang ada di kawasan penambangan PTFI tersebut.

Tugas perusahaan besar pada dasarnya tidak hanya mengeruk kekayaan alam di suatu wilayah, akan tetapi skurang-kurangnya menurut Philip Kotler dan Nancy Lee di dalam bukunya *Corporate Social Responsibility*, ada enam bentuk program perusahaan yang harus dilakukan berkaitan dengan berbagai masalah sosial dan sekaligus sebagai wujud tanggungjawab perusahaan, yakni:

1. Memberikan kontribusi dana atau penggalangan dana untuk meningkatkan kesadaran akan masalah-masalah sosial tertentu,
2. Memberikan kontribusi perusahaan melalui penyisihan sepersekian persen dari pendapatannya untuk donasi bagi masalah sosial atau prodyuk tertentu,
3. Perusahaan hendaknya membantu pengembangan maupun implementasi dari kampanye yang berfokus untuk merubah perilaku yang negatif, seperti kerusakan lingkungan sosial maupun alam,
4. Inisiatif perusahaan untuk memberikan kontribusi secara langsung kepada suatu aktivitas amal, lebih sering dalam bentuk donasi langsung atau sumbangan tunai,
5. Perusahaan memberikan bantuan dan mendorong karyawan serta mitra bisnisnya untuk secara sukarela terlibat serta membantu masyarakat setempat, dan
6. Perusahaan hendaknya berinisiatif mengadopsi dan melakukan praktek bisnis tertentu serta investasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas komunitas dan melindungi lingkungan.

Tentu, Freeport sudah melakukan sebagian program tersebut, akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah "sberapa efektif hasilnya? Jadi, memang harus ada audit ulang terhadap kegiatan produksi Freeport maupun perhatian perusahaan tersebut terhadap lingkungannya. □

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 5

TAHUN 2006

MENYUSURI SUNGAI LIMBAH DI KAKI GUNUNG EMAS FREEPORT (10)

Limbah Datang, Ikan-ikan Pun Menghilang

SEMENTARA Freeport terus memeteraikan hubungannya dengan militer, Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia yang kurang berpengalaman itu tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa menonton limbah dari tambang itu menumpuk semakin tinggi. Tahun ini (2005 -red) Freeport memberitahu pemerintah Indonesia bahwa limbah batuan di daerah pegunungan, sedalam 900 kaki, ini telah mencakup wilayah seluas tiga mil persegi. Jauh di bawah, terletak dataran rendah basah yang luasnya kurang lebih 90 mil persegi. Daerah itu sebelumnya adalah habitat air tawar yang paling kaya di dunia.

Sekarang, kawasan ini terkubur di bawah limbah tambang, yang disebut *tailings*, dengan kandungan tembaga yang begitu tinggi yang mengakibatkan hampir semua jenis ikan menghilang. Hal ini sebagaimana dilaporkan dalam dokumen-dokumen Kementerian Lingkungan Hidup. Menurut Russell Dodt, seorang ahli teknik sipil Australia yang bertanggung jawab mengelola limbah tersebut di dataran rendah basah

selama 10 tahun sampai tahun 2004, limbah itu, yang bentuk dan warnanya seperti semen basah, masuk ke dalam sungai, dan menggenangi dan mengubur semua lintasan yang dilaluinya.

Kurang lebih sepertiga dari limbah itu sudah pindah ke muara pantai, suatu tempat sangat penting bagi pemijahan ikan, dan banyak yang kemudian "tersapu ke laut oleh ombak yang bergerak seperti pengisap raksasa," katanya. Tetapi tidak ada pemerintah, termasuk di era demokrasi di Indonesia sekarang ini, yang punya

cukup keberanian untuk mengganggu prerogatif Freeport ini. Tantangan terbesar terjadi pada tahun 2000, ketika Sonny Keraf, seorang politisi agresif, yang bersimpati kepada orang-orang Papua, diangkat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Keraf pada awalnya menolak bertemu bos Freeport ini, tetapi akhirnya setuju, dan pada hari itu Moffett harus menunggu selama satu setengah jam. "Dia begitu angkuh," demikian Keraf mengomentari pertemuan itu dalam salah satu wawancara baru-baru ini. "Ya duduk berpangku kaki di hadapan saya."

Freeport menolak mengomentari pertemuan itu. Robert Gelbard, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia pada saat itu, mengatakan berikut ini dalam suatu wawancara: "Itu pertemuan yang buruk sekali." Keraf mengatakan bahwa Moffett menyatakan perusahaannya tidak pernah melakukan polusi. (*Laporan investigatif wartawan New York Times Jane Perlez, Raymond Bonner dan kontributor Evelyn Rusli, Below a Mountain of Wealth, a River of Waste, 27 Desember 2005.*) ■ Bersambung